

---

---

## KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

*Usmar ismail<sup>1)</sup>, Kurnia Sari Dewi<sup>2)</sup>*

<sup>1)2)</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
Jakarta, Indonesia  
Email:<sup>1)</sup>usmar88@yahoo.com,<sup>2)</sup>ksdewi@yahoo.com

**Abstract.** *This study aimed to analyze and obtain empirical evidence about the effect of population density area lie within the region, the balance funds, income per capita, financing surplus budget (SiLPA), revenue (PAD) and the product Gross Domestic (GDP) of the Allocation of Capital Expenditure LGs in Indonesia. This research was conducted on the financial statements of the realization of the budget of the Ministry of Finance Director General of Local Government Fiscal Balance and Loparan that diteima of BPS in the Indonesian province that includes 33 provinces. Methods of data collection in this research is literature study (Library Research), a study by completing and understand a variety of materials and writings relating to the issues to be addressed in the study include reading, studying, and examines the literature relating to research do.*

*The results of this study are expected to help identify and give due consideration to local government in Indonesia and factors - the dominant factor in making the decision to finance capital expenditure areas can be managed optimally, particularly in relation to the source of funding of capital expenditures.*

*Keywords: Income per Capita, SiLPA, Population Density, DBH GRDP, PAD, Total Territory*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepadatan penduduk luas wilayah, dana perimbangan, pendapatan per kapita, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), pendapatan Asli Daerah (PAD) dan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan yaitu realisasi anggaran dari Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah dan Loparan yang diteima dari BPS di Provinsi Indonesia yang meliputi 33 Provinsi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian dengan cara melengkapi dan memahami berbagai bahan dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian termasuk dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian ini yang diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah di Indonesia dan faktor – faktor yang dominan dalam membuat keputusan alokasi belanja modal sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara optimal, terutama yang terkait dengan sumber pendanaan belanja modal.

Kata kunci : Pendapatan per Kapita, SiLPA, Kepadatan Penduduk, Dana Perimbangan, PDRB, PAD, Luas Wilayah

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal.

Dalam lima tahun terakhir, realisasi belanja modal pemerintah selalu menunjukkan persentase yang menyedihkan. Sejak 2008 silam pertumbuhannya tidak pernah melampaui 15 persen, di saat penyerapan anggaran juga tak pernah menyentuh 100 persen. Hal itu jauh berbeda dibanding belanja barang yang kenaikan rata-rata dalam periode yang sama mencapai 25 persen. Data dari Kementerian Keuangan bahkan mengungkapkan, bahwa sejak 2009 persentase belanja modal mulai lebih kecil ketimbang belanja barang. Saat itu belanja modal hanya 8,09 persen terhadap total belanja negara sebesar Rp937,382 triliun atau sekitar Rp75,87 triliun. Sementara itu, belanja barang mencapai 8,6 persen dari belanja negara atau sekitar Rp80,66 triliun. Untuk belanja pegawai, bahkan angkanya mencapai 13 persen.

Tahun 2012 pun kenyataannya tidak jauh berbeda. Akibat anggaran belanja yang didominasi untuk subsidi, belanja modal pemerintah di 2012 ditetapkan Rp168.671 triliun, lebih rendah dari belanja pegawai yang sebesar Rp212.255 triliun. Lagi-lagi, realisasi belanja modal per 31 Desember 2012 hanya sebesar 79,6 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini secara persentase lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 83,6 persen. Di tahun 2013, belanja belanja pegawai dipatok Rp 241,121 triliun, sementara belanja modal lebih rendah yakni Rp 193,837 triliun. Hingga menjelang disobeknya kalender terakhir tahun 2013, kementerian dan lembaga belum juga optimal melakukan belanja modal. Malahan angkanya hingga akhir akhir November 2013 masih di level 55,7 persen ([www.stabilitas.co.id](http://www.stabilitas.co.id)).

Pada tanggal 2 April 2013, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan adanya penyimpangan dalam realisasi belanja modal untuk fasilitas umum. Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, terdapat penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 817,47 miliar dari 1.453 kasus. Secara umum kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum, antara lain terjadi karena kelalaian rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dalam kontrak.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakcermatan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan barang dalam melaksanakan tugasnya. Serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat/pimpinan entitas, pemeriksaan belanja modal untuk

fasilitas umum tersebut merupakan kompilasi dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Belanja modal untuk fasilitas umum di antaranya digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan. Temuan terkait belanja modal untuk fasilitas umum terjadi berulang dari tahun ke tahun. Jadi dalam hal ini kemanfaatan belanja modal tidak digunakan seperti yang ada pada konsep *multi-term expenditure framework (MTEF)*.

Studi yang dilakukan oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menunjukkan bahwa dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan per kapita tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui pendapatan asli daerah. Dan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Sementara itu SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Kusnandar dan Dodik Siswanto (2007) dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai :

1. Pengaruh pendapatan per kapita terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.
2. Pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.
3. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.
4. Pengaruh dana perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.
5. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.
6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.
7. Pengaruh luas wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemda di Indonesia.

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti dan melatih diri berpikir secara ilmiah, serta semakin memahami permasalahan yang berkaitan dengan topic yang diteliti.
2. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melakukan upaya untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan secara optimal sumber pendanaan belanja modal Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah khasanah dan memperkaya penelitian ilmiah yang berkaitan dengan bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang Alokasi Belanja Modal. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang dipakai sebagai dasar-dasar penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji masalah yang sama di masa mendatang.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan atau rekomendasi untuk para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, kalangan usaha, dan masyarakat, sehingga pada akhirnya, para pemangku kepentingan agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Belanja Modal**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal menurut Christy dan Adi (2009) adalah “belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu”. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful,2006) : **a).** Belanja Modal Tanah; **b).** Belanja Modal Peralatan dan Mesin; **c).** Belanja Modal Gedung dan Bangunan; **d).** Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; **e).** Belanja Modal Fisik Lainnya

### **Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita (*per capita income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (Susman, 2010). Menurut Budiono (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita. Dimana secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Per Kapita (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004).

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

### **Kepadatan Penduduk**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan

pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan tersebut diukur dengan menggunakan indikator tertentu yang di antaranya adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Kedua indikator ini saling terkait dan secara bersama-sama mempengaruhi formulasi kebutuhan pendanaan daerah. Untuk mengakomodasi faktor tersebut, diperlukan variabel bebas lain yang lebih tepat yaitu variabel rasio perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, atau rasio kepadatan penduduk (*density*).

### **Dana Perimbangan**

Menurut UU no 33 tahun 2004 Dana Perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa Dana Perimbangan dapat dipakai sebagai sumber pembiayaan dalam Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah tidak boleh melupakan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga tidak terlalu bergantung pada Dana Perimbangan tersebut. Dana Perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU no 33 tahun 2004). b. Dana Alokasi Umum, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU no 33 tahun 2004). DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat metode pendekatan yakni: a. Pendekatan Produksi; b. Pendekatan pendapatan; c. Pendekatan Pengeluaran; d. Metode Alokasi.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

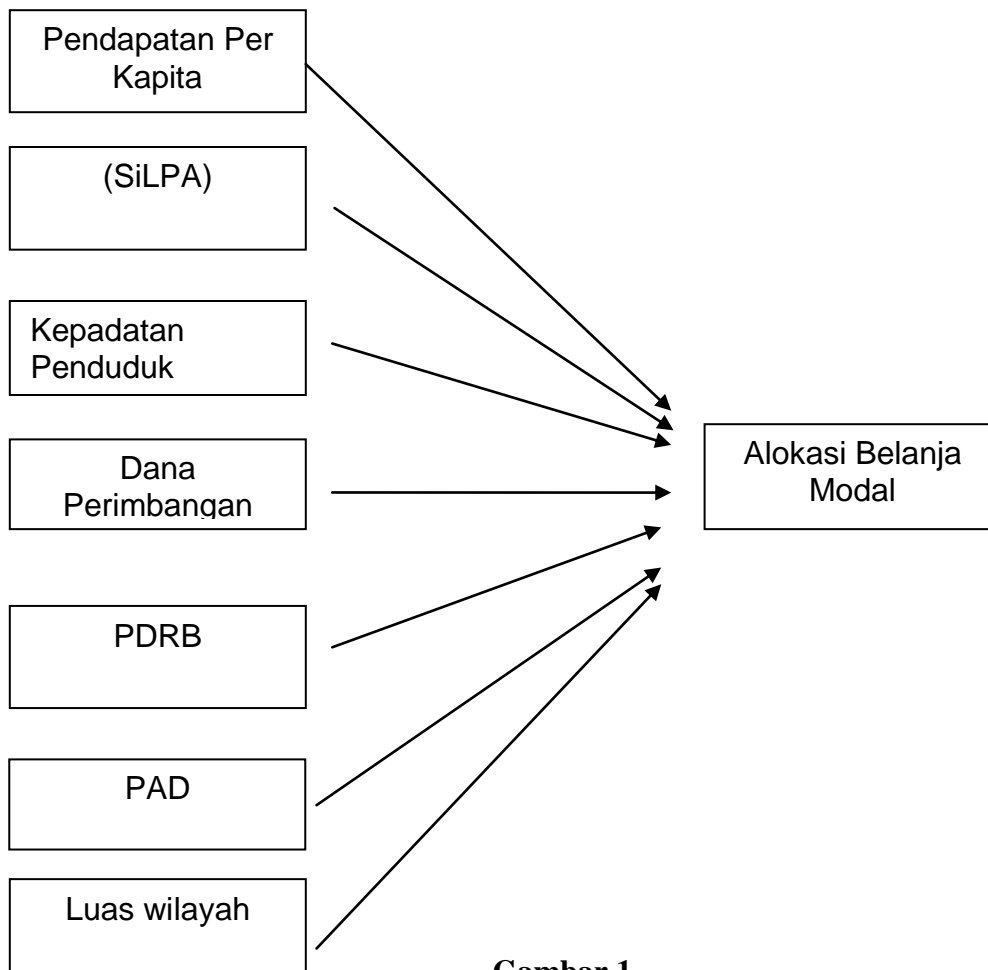
Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Prakoso, Rendy Y. B, 2011)

### **Luas Wilayah**

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah di kelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun provinsi. Untuk memperlancar proses pemerintahan di daerah yang luas, maka salah satu tujuan pembangunan adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur merupakan instrument untuk memperlancar berputarnya roda pemerintahan serta perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan (Basri, 2002).

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen yaitu kepadatan penduduk, luas wilayah, dana perimbangan, pendapatan per kapita, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta satu variabel dependen yaitu Keputusan Belanja Modal.



**Gambar 1**

Pengaruh Pendapatan Perkapita, Silpa, Kepadatan Penduduk, Dana Perimbangan, PDRB, PAD dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal.

## **HIPOTESIS**

### **1. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Alokasi Belanja Modal**

Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Dari gambaran ini, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal

- 2. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal**  
SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :  
H2 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal
- 3. Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal**  
Anasmen membuktikan bahwa belanja modal memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Kusnandar dan Siswantoro (2012) membuktikan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh luas wilayah. Oleh karena itu, hipotesis Kepadatan Penduduk terhadap belanja modal adalah:  
H3 : Kepadatan Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- 4. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal**  
Penelitian David Priyo Hadi menunjukkan jika DAU berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Gunawan dan Erlina juga menunjukkan bahwa, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan konsep-konsep tersebut diatas, maka hipotesis alternative untuk melihat pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :  
H4 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal.
- 5. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Alokasi Belanja Modal**  
Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah, dan penelitian oleh farah marta yovita (2011) yang memperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, maka hipotesis alternative untuk melihat pengaruh PDRB terhadap alokasi anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :  
H5: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal
- 6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal**  
Darwanto dan Yustikasari (2007) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun terkadang peningkatan



PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya, maka hipotesis alternative untuk melihat pengaruh PAD terhadap alokasi anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :

H6 ; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja modal

7. **Pengaruh Luas Wilayah terhadap keputusan belanja modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2007) menyatakan hal tersebut bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, maka hipotesis alternative untuk melihat pengaruh PAD terhadap alokasi anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :

H7 : Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, luas wilayah, dana perimbangan, pendapatan per kapita, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta satu variabel dependen yaitu Alokasi Belanja Modal.

### **Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran**

#### **1. Definisi operasional variable**

##### **a. Variabel terikat**

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Modal (Y) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.32 Tahun 2004).

##### **b. Variabel bebas**

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat 7 variabel bebas antara lain :

##### **1). Pendapatan Per kapita**

Pendapatan per kapita (*per capita income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (Susman, 2010).

##### **2). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD,

pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3). **Kepadatan Penduduk**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan tersebut diukur dengan menggunakan indikator tertentu yang di antaranya adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Kedua indikator ini saling terkait dan secara bersama-sama mempengaruhi formulasi kebutuhan pendanaan daerah.

4). **Dana Perimbangan**

UU no 33 tahun 2004 menjelaskan tentang definisi Dana Perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

5). **Produk domestik regional bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

6). **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU No.33/2004)

7). **Luas Wilayah**

Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun provinsi. Luas wilayah sangat erat kaitannya dengan geografis suatu daerah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yaitu realisasi anggaran dari Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan yang diterima dari BPS di Provinsi Indonesia yang meliputi 33 provinsi. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel penelitian ini adalah realisasi belanja modal, pendapatan per kapita, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, luas wilayah, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian ini mengambil data pada tahun 2011-2013, dengan jumlah data sebanyak 33 provinsi, maka jumlah data penelitian keseluruhan menjadi  $3 \times 33 = 99$  data.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian dengan cara melengkapi dan memahami berbagai bahan dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian termasuk dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sifatnya teoritis dan digunakan sebagai pembanding dalam pembahasan. Referensi yang digunakan dalam penelitian pustaka menggunakan data sekunder seperti laporan-laporan atau dokumen-kepadatan penduduk, luas wilayah, dana perimbangan, pendapatan per kapita, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta Alokasi Belanja Modal melalui Badan Pusat Statistik dan data Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdapat di internet dalam website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

### **Metode Analisis Data**

Dalam metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Penelitian Kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Dalam metode analisis menggunakan olahan software SPSS. Pengujian atau perhitungan menggunakan SPSS yang meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

#### **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda. Sebelum pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

##### **a. Uji Normalitas**

Menurut Imam Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui

dapat melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya.

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan <5% (0,05)

H<sub>A</sub> : Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 5% (0,05)

### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolinearitas bertujuan Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel –variabel ini tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagaiberikut :

1. Nilai R<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya lebih dari 10% dan memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, maka model regresi tersebut bebas dari masalah multikoleniaritas

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2). Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **d. Uji Autokorelasi**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan-kesalahan pada periode t<sub>1</sub> (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin -Watson (DW Test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2013)

- 1). Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4- du) maka koefisien autokorelasi sama dengan 0 berarti tidak ada autokorelasi.
- 2). Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (di),maka koefisien auto korelasi lebih daripada 0,berarti ada auto korelasi positif.

- 3). Bila nilai DW lebih daripada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi negatif.
- 4). Bila nilai DW terletak diantara batas atas  $(du)$  dan batas bawah  $(dl)$  atau DW terletak antara  $(4du)$  dan  $(dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### 3. Uji Kesesuaian Model

Uji Kesesuaian Model yang digunakan meliputi: uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji pengaruh secara bersama-sama (F-test).

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi data silang (*crosssection*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinan yang tinggi.

#### b. Uji Secara Bersama-sama (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama pengujian dilakukan 5% dengan criteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots B_k = 0$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variable dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots B_k = 0$  artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

b. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$   $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant* 5% dengan criteria penguji sebagai berikut:

$H_a : \beta = 0$  artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$  artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterimadan  $H_1$  ditolak

b. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_1$  diterimadan  $H_0$  ditolak

**b. Analisis Regresi Berganda**

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gurajati,2003).

**HASIL PENELITIAN**

**Analisa Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing- masing variabel yang terdapat dalam suatu penelitian. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Alokasi Belanja Modal, Pendapatan Per Kapita, Sisa Pembiayaan Anggaran, Kepadatan Penduduk, Dana Perimbangan, PDRB, Pendapatan Asli Daerah, serta luas wilayah tahun 2011 – 2013, maka statistik deskriptif yaitu nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Analisa Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Belanja Modal	99	135387012.00	15732626703.00	1003607244.8485	1910701474.19385
Pendapatan Per Kapita	99	269.17	5293.10	1212.7275	1168.67441
Sisa Pembiayaan Anggaran	99	282830.00	9463722000.00	752709957.6061	1344172389.48254
Kepadatan Penduduk	99	785979.00	45340799.00	7414070.1919	10447562.10704
Dana Perimbangan	99	9797950.00	1889267850.00	789798856.0606	365342222.15963
Produk Domestik Regional Bruto	99	3021000000.00	471883000000.00	74401212121.212	110331442574.25340
Pendapatan Asli Daerah	99	84811588.00	26670448766.00	2551670762.5859	4279454664.01542
Luas Wilayah	99	662.33	316553.07	58046.0206	60061.39129
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa jumlah data N masing – masing variabel sebanyak 99 sampel hasil pengamatan selama 3 tahun, berdasarkan data tabel diatas dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a. Alokasi Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap. Dari tabel diatas Belanja Modal yang memiliki nilai rata-rata (mean) Tahun 2011 – 2013 sebesar 1003607244.84 dan nilai standar deviasi

1910701474.19 yang mencerminkan bahwa jumlah belanja modal di seluruh Provinsi Indonesia jumlahnya merata. Nilai maksimum dengan nilai Rp. 15.732.626.703 yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta tahun 2013 berarti provinsi tersebut memiliki anggaran pengeluaran untuk aset tetap yang tertinggi. Dan nilai minimum sebesar 8,1316 dengan nilai Rp. 135.387.012.000 yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 berarti provinsi tersebut memiliki anggaran belanja modal yang terendah.

- b. Pendapatan Per Kapita merupakan alat untuk mengukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara atau daerah. Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Per Kapita memiliki standar deviasi 1168,6744 dan rata – rata 1212.727. Nilai maksimum dari Pendapatan Per Kapita adalah 5293,1026 yang diperoleh provinsi Papua Barat tahun 2012, yang menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki tingkat kemakmuran tertinggi selama 3 tahun dibandingkan provinsi lain. Nilai minimumnya adalah 269,1720 yang diperoleh provinsi Jawa Tengah tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa jawa tengah tingkat kemakmuran nya terendah dibandingkan provinsi lain selama 3 tahun periode 2011 – 2013.
- c. Sisa Pembayaran Anggaran (SilPA) merupakan alat untuk mengukur efesiensi pendistribusian keuangan daerah. Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Per Kapita memiliki standar deviasi 1344172389.48 dan rata – rata 752709957.60. Nilai maksimum dari Pendapatan Per Kapita adalah Rp. 9.463.722.000 yang diperoleh DKI Jakarta tahun 2013, yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat efesiensi tertinggi selama 3 tahun dibandingkan provinsi lain. Nilai minimumnya adalah Rp. 282.830 yang diperoleh provinsi Papua Barat tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa Papua Barat tingkat efesiensi nya terendah dibandingkan provinsi lain selama 3 tahun periode 2011 – 2013
- d. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah, berdasarkan data tabel diatas kepadatan penduduk menunjukkan standar deviasi 10447562.10 dan rata – rata 752709957.60. Nilai maksimum dari Kepadatan Penduduk adalah 45.340.799 yang dimiliki oleh Jawa Barat tahun, hal itu berarti Jawa Barat memiliki kepadatan tertinggi di tahun 2013 selama 3 tahun dibandingkan provinsi lain. Nilai minimum dari Kepadatan penduduk adalah yang diperoleh provinsi Papua Barat 785.979, hal tersebut menunjukkan bahwa Papua Barat kepadatan penduduknya terendah di tahun 2011 dibandingkan provinsi lain.
- e. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dianggarkan kepada seluruh provinsi untuk pemerataan keuangan antar daerah. Dari table diatas Dana Perimbangan memiliki standar deviasi 365342222.15 dan memiliki nilai rata – rata (mean) 789798856.06. Nilai maksimum sebesar 9,2763 atau dengan nilai sebesar Rp. 1.889.267.850 yang diperoleh oleh provinsi Papua pada tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa Papua mendapatkan Dana Perimbangan dari pemerintah terbesar diantara provinsi yang lainnya pada tahun 2013. Nilai minimum sebesar 6,9911 atau dengan nilai sebesar Rp. 9.797.950.000 yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012, menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan menerima DAU dari pemerintah terkecil dari provinsi lain pada tahun 2012.

- f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu. Dari table diatas standar deviasi dari PDRB sebesar 110331442574.25 dan rata – rata nya sebesar 74401212121.21. Nilai maksimum dari PDRB berdasarkan table diatas adalah 11,6738 atau dengan nilai sebesar Rp.471.883.000.000 yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh PDRB tertinggi dari provinsi lain. Sedangkan nilai minimum berdasarkan table diatas adalah 9,4802 atau dengan nilai sebesar Rp. 3.021.000.000 yang dimiliki oleh provinsi Gorontalo tahun 2011, data tersebut menunjukkan bahwa Gorontalo mengalami pertumbuhan ekonomi terendah dari provinsi lain.
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Dari tabel diatas PAD memiliki standar deviasi 4279454664.01 dan memiliki nilai rata- rata (mean) 2551670762.58. Nilai maksimum sebesar Rp. 26.670.448.766 yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta tahun 2013 berarti provinsi tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang tertinggi. Nilai minimum sebesar Rp. 84.811.588 yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara tahun 2011 berarti provinsi tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang terendah.
- h. Luas Wilayah merupakan area produktif dimasing-masing daerah. Dari tabel diatas Luas Wilayah memiliki standar deviasi 60061.39 dan memiliki nilai rata- rata (mean) 58046.02. Nilai maksimum sebesar 316553.07 yang dimiliki oleh provinsi Papua tahun 2011-2013 berarti provinsi tersebut memiliki luas wilayah yang masih berpotensi untuk produktivitas daerah yang tertinggi. Nilai minimum sebesar 662.33 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2013 berarti provinsi tersebut memiliki luas wilayah terbatas dan sudah maksimum pemanfaatannya yang terendah.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas Data**

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji statistic Kolmogrov – smirnov yang tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel terikat dan variabel bebas yang mempunyai distribusi normal atau tidak normal.



**Tabel 5.2**  
**Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.16280698
	Absolute	.044
Most Extreme Differences	Positive	.041
	Negative	-.044
Kolmogorov-Smirnov Z		.436
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2016

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Kolmogorov\_Smirnov Z sebesar 0,436 dan Asymp.sig. sebesar 0,991 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan pengujian berikutnya dapat dilanjutkan.

### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan Per Kapita	.269	3.724
Sisa Pembiayaan Anggaran	.472	2.118
Kepadatan Penduduk	.064	5.526
Dana Perimbangan	.757	1.320
Produk Domestik Regional Bruto	.057	7.614
Pendapatan Asli Daerah	.061	6.506
Luas Wilayah	.831	1.204

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Dalam tabel output diatas terlihat bahwa nilai VIF untuk ketujuh variabel bebas tersebut diatas semuanya memiliki nilai VIF yang bernilai lebih kecil dari 10 yaitu Pendapatan Per Kapita dengan nilai 3.724, SILPA dengan nilai 2.118, Kepadatan Penduduk dengan nilai 5.526,

Dana Perimbangan dengan nilai 1.320, PDRB dengan nilai 7.614, PAD dengan nilai 6.506 dan Luas Wilayah dengan nilai 1,204 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

### Uji Autokorelasi

Adapun berdasarkan hasil perhitungan SPSS maka hasil uji Durbin Watson Test dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,908 <sup>a</sup>	,824	,811	,168953	1,598

a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Pendapatan Per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Perimbangan, Sisa Pembiayaan Anggaran, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

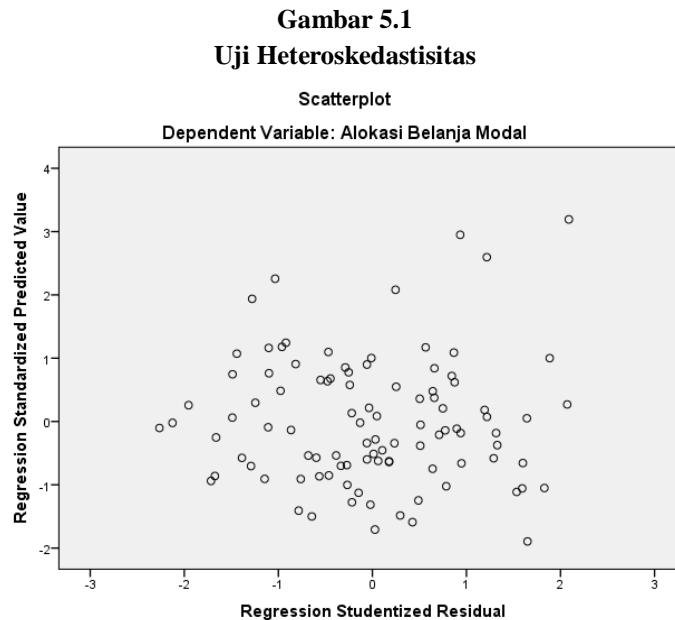
Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016

Berdasarkan tabel output diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson hitung atau adalah sebesar 1,598 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel ( $n = 99$ ) dan jumlah variabel ( $k=7$ ) maka pada table DW didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1,524 dan batas atas (dU) sebesar 1,826 berada di area  $dL < dw < 4-dU$  ( $1,524 < 1,598 < 1,822$ ) atau berada di area tidak ada autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID).

Grafik scatterplot dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016

Dalam grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik –titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini bertujuan untuk menentukan persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel bebas secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilainya mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi-variabel dependen. *Model Summary* untuk penelitian ini adalah seperti terlihat pada tabel 5.4 diatas.

Berdasarkan output SPSS di atas terlihat bahwa nilai *R Square* adalah sebesar 0,824. Ini berarti bahwa sebesar 82,4 % variasi variabel dependen Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independennya yaitu ; Pendapatan Per Kapita, SILPA, PDRB, Dana Perimbangan, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah. Sedangkan sisanya sebesar 17,6% dijelaskan sebab yang lain diluar model. Dan untuk nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,811 yang artinya bahwa variabel Pendapatan Per

Kapita, SILPA, PDRB, Dana Perimbangan, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah berpengaruh sebesar 81,1% terhadap Alokasi Belanja Modal.

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam uji ini terlihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil uji F ini dapat dilihat pada hasil output SPSS dalam tabel ANOVA. Hasil uji ANOVA dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Tabel Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.175	7	1.739	60.931	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2.598	91	.029		
	Total	14.773	98			

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Pendapatan Per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Perimbangan, Sisa Pembiayaan Anggaran, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olag Data SPSS, 2016

Berdasarkan tabel ANOVA diatas terlihat bahwa nilai  $F_{Hitung}$  adalah sebesar 60,931 dengan nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  atau 5%. ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya semua variabel independen secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama- sama antara variabel bebas Pendapatan Per Kapita, SILPA, PDRB, Dana Perimbangan, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah terhadap variabel terikat Alokasi Belanja Modal. Atau dapat dikatakan bahwa nilai dari variabel-variabel bebas tersebut secara keseluruhan mempengaruhi Alokasi Belanja Modal

#### Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing- masing variabel independen secara parsial ( individual ) terhadap variabel dependen. Dengan perhitungan SPSS hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Tabel Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.292	.649		.450	.654
1 Pendapatan Per Kapita	.932	.108	.733	8.641	.000
Sisa Pembiayaan Anggaran	-.015	.034	-.028	-.444	.658
Kepadatan Penduduk	.460	.156	.512	2.954	.004
Dana Perimbangan	.007	.050	.007	.147	.884
Produk Domestik Regional Bruto	.032	.130	.045	.243	.808
Pendapatan Asli Daerah	.241	.124	.346	1.938	.056
Luas Wilayah	.050	.036	.067	1.382	.170

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016

Setelah mengetahui nilai  $t_{hitung}$  maka selanjutnya dicari nilai  $t_{tabel}$  dengan ketentuan nilai  $n = 99$  dan jumlah variabel dependen dan independen  $= 7$ , sehingga didapat nilai  $df$  adalah  $(99 - 7 = 92)$ , dan nilai  $\alpha = 5\%$ . Setelah dicari dalam tabel  $t$  maka didapat nilai  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1,661. Dengan demikian dapat untuk periode penelitian ini yaitu tahun 2011-2013 didapat hasil sebagai berikut :

- Variabel Pendapatan Per Kapita memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 8,641. Nilai ini lebih besar dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,661. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel Pendapatan Per Kapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Alokasi Belanja Modal, sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.
- Variabel SILPA memiliki nilai  $t$  hitung sebesar -0,444. Nilai ini lebih kecil dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,661. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel SILPA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Alokasi Belanja Modal, sehingga hipotesis H2 dalam penelitian ini tidak diterima.
- Variabel Kepadatan Penduduk memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 2,954. Nilai ini lebih besar dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,661. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel Kepadatan Penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Alokasi Belanja Modal, sehingga hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.
- Untuk variabel Dana Perimbangan memiliki nilai  $t$  hitung sebesar -0,147 lebih kecil dari nilai 1,661 yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Perimbangan dengan variabel Alokasi Belanja Modal, sehingga hipotesis H4 yang menyatakan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi Belanja Modal tidak diterima.
- Untuk variabel PDRB nilai  $t$  hitung adalah 0,243 dibawah nilai 1,661 artinya tidak terdapat

pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap Alokasi Belanja Modal, dengan demikian hipotesis H5 dalam penelitian ini tidak diterima.

- f. Dan untuk variabel PAD nilai t hitung adalah 1,938 diatas nilai 1,661 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari PAD terhadap Penerimaan Daerah, dengan demikian hipotesis H6 dalam penelitian ini dapat diterima.
- g. Untuk variabel Luas Wilayah nilai t hitung adalah 1,382 dibawah nilai 1,661 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal, dengan demikian hipotesis H7 dalam penelitian ini tidak diterima.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Regresi linear berganda merupakan alat ukur mengenai pengaruh yang terjadi antara variabel dependen (y) dengan satu atau lebih variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , ...). Berdasarkan tabel coefficients diatas ( tabel 5.6 ) maka persamaan regresi linear berganda dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{Abm} = 0,292 + 0,932 \text{Pend\_kapita} + -0,015 \text{Silpa} + 0,460 \text{Kpdt\_Pddk} + -0,007 \text{Dana\_Perbgn} + 0,032 \text{PDRB} + -0,241 \text{PAD} + 0,050 \text{Luas\_Wil} + e$$

Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien Pendapatan Per Kapita untuk variabel  $X_1$  adalah sebesar 0,932. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dalam periode tahun 2011-2013 setiap ada kenaikan Pendapatan Per Kapita satu satuan maka variabel Alokasi Belanja Modal juga akan naik sebesar 0,932 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- b. Nilai koefisien SILPA untuk variabel  $X_2$  adalah sebesar -0,015 dengan tanda negatif artinya dalam penelitian ini setiap kenaikan SILPA satu satuan maka variabel Alokasi Belanja Modal juga akan turun sebesar -0,015 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap.
- c. Nilai koefisien Kepadatan Penduduk untuk variabel  $X_3$  adalah sebesar 0,460. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dalam periode tahun 2011-2013 setiap ada kenaikan Kepadatan Penduduk satu satuan maka variabel Alokasi Belanja Modal juga akan naik sebesar 0,460 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- d. Nilai koefisien Dana Perimbangan untuk variabel  $X_4$  adalah sebesar -0,007 dengan tanda negatif artinya dalam penelitian ini setiap kenaikan Dana Perimbangan satu satuan maka variabel Alokasi Belanja Modal juga akan turun sebesar -0,007 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap.
- e. Nilai koefisien PDRB untuk variabel  $X_5$  adalah sebesar 0,032. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dalam periode tahun 2011-2013 setiap ada kenaikan PDRB satu

satuan maka variabel Alokasi Belanja Modal juga akan naik sebesar 0,032 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap

- f. Untuk variabel ini nilai koefisien untuk variabel  $X_6$  adalah sebesar -0,241 dengan tanda negatif, ini berarti bahwa setiap ada kenaikan PAD satu satuan maka Alokasi Belanja Modal turun sebesar -0,241 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah tetap.
- g. Nilai koefisien Luas Wilayah untuk variabel  $X_7$  adalah sebesar 0,050. Ini berarti dalam penelitian ini setiap kenaikan Luas Wilayah satu satuan maka variabel Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,050 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya adalah tetap.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan uji statistik maka dalam penelitian ini didapat hasil sebagai berikut :

### **Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Alokasi Belanja Modal**

Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Dari hasil penelitian ini Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal sejalan dengan penelitian sebelumnya dan hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita secara langsung meningkat pula Alokasi Belanja Modal maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal (**Diterima**)

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal**

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian ini SiLPA tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dan hal ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak dapat menjadi sumber dana bagi daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya maka hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut :

H2 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal **(Tidak Diterima)**

### **Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Anasmen membuktikan bahwa belanja modal memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Kusnandar dan Siswantoro (2012) membuktikan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh luas wilayah. Dari hasil penelitian ini Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal sejalan dengan penelitian sebelumnya dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat Kepadatan Penduduk dalam penelitian ini berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dibawah ini:

H3 : Kepadatan Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. **(Diterima)**

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Penelitian David Priyo Hadi menunjukkan jika DAU berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Gunawan dan Erlina juga menunjukkan bahwa, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian ini Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dan Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan bukan lagi sumber utama pendapatan bagi daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya maka hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal. **(Tidak Diterima)**

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Alokasi Belanja Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah, dan penelitian oleh farah marta yovita (2011) yang memperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Dari hasil penelitian ini PDRB tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal sejalan dengan penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah maka hipotesis alternative untuk melihat pengaruh PDRB terhadap alokasi anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :

H5: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal **(Tidak Diterima)**



### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal**

Darwanto dan Yustikasari (2007) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya. Dari hasil penelitian ini Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal sejalan dengan penelitian sebelumnya dan hal ini menunjukkan dengan meningkatnya PAD berarti Belanja Modal meningkat pula maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H6 ; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja modal (**Diterima**)

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap keputusan belanja modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswanto (2007) menyatakan hal tersebut bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian ini luas wilayah tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H7 : Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal (**Tidak Diterima**).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empirik mengenai Kebijakan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Indonesia maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Per Kapita berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi belanja modal
- b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi belanja modal
- c. Kepadatan Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- d. Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi belanja modal
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi belanja modal.
- f. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja modal
- g. Luas Wilayah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi belanja modal.

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai Kebijakan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Indonesia untuk periode pengamatan mulai tahun 2011-2013 berikut ini diajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Keterbatasan waktu dan variabel penelitian menyaran bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel penelitian serta memperluas daerah penelitian sehingga diharapkan hasilnya dapat lebih bervariasi dan digunakan sebagai bahan perbandingan.
- b. Penelitian berikutnya dapat dilakukan pada kabupaten dan kota dengan melihat pertumbuhan belanja modal beberapa tahun yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah", *UPP-AMP Yogyakarta*.
- Ardhiyansyah, Indra Widhi. 2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Badan pusat statistic. "Jakarta dalam Angka 2012. ". Dispenda DKI Jakarta.
- Gatot Dwi Adiatmojo. 2003 "Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin," Jakarta
- H.A.W.Wijaya. 2007. "Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia." Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haryanto Sukandarrumidi. 2008. "Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian". UGM Press, Jakarta
- Indra Bastian, 2006. "Akuntansi Sektor Publik". Jakarta, Erlangga
- Indra Rindu Datu K. 2012. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Makassar tahun 1999-2009", Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin, Makassar
- Iqbal Hasan, 2004. "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik ", 2004
- Marihot P Siahaan. 2008. " Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ", RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ni Nyoman Pande Ariasih, "Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Propinsi Bali Tahun 1991-2010." Bali 2011
- NN, 2003, " Pendapatan Asli Daerah " Erlangga, Jakarta
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. 2005. "Pemerintahan Daerah di Indonesia", CV Pustaka Setia, Bandung
- Rahma Kurnia. 2006. *Kepadatan Penduduk*. [rahma-kurnia.blogspot.com](http://rahma-kurnia.blogspot.com), Diakses 15 Juni 2013.
- Rudy Badrudin . 2004. "Pengantar Ekonomi Mikro " BP STIEYKPN, Yogyakarta.
- Sugijanto, 1995. " Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non Laba ". Malang.
- Sukirno, 1978. "Pertumbuhan ekonomi". Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Suparmoko. 2002. "Pengeluaran Pemerintah", *Erlangga, Jakarta*.
- Sutrisno. 1984. "Konsep Pendapatan Asli Daerah ", Rajawali, Jakarta.
- Teguh Hadi Wardoyo. 2011. "Pajak Terapan Brevet A & B," Jakarta ,2011
- Undang-undang No.32 tahun 2004, "Undang-undang Otonomi Daerah", Jakarta, Fokusmedia, 2004

Wiratno Bagus Suryono. 2010. “Analisis Pengaruh PAD, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah”, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.